



PROSEDUR DAN BUKTI PHK DALAM PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

Oleh;
Drs. Much Zamhari. MM



Sosialisasi PP No. 6 tahun 2025
Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan P
Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos
Mataram, 20 Nopember 2025



M. ZAMHARI

YOGYAKARTA, 9- 3- 1961



JL. LARASMOYO 123 Solo, Jawa Tengah



PPSDM KETENAGAKERJAAN



085216321482



0271 8200470

STATUS : ISTRI 1, ANAK 2, CUCU 4

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari

*unsur pengusaha, pekerja/buruh,
dan pemerintah*

yang didasarkan pada
nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945



APA ITU HUBUNGAN KERJA ?

HUBUNGAN KERJA



Hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan **Perjanjian Kerja** yang mempunyai unsur upah, perintah, dan pekerjaan.



**KAPAN DIMULAI ADANYA
HUBUNGAN KERJA ?**

HUBUNGAN KERJA DIMULAI



SEJAK TERCAPAINYA KESEPAKATAN UNTUK
MENGADAKAN HUBUNGAN KERJA DAN
DIBUKTIKAN DENGAN DITANDA TANGANI
PERJANJIAN KERJA OLEH KEDUA BELAH PIHAK.

KESEJAHTERAAN

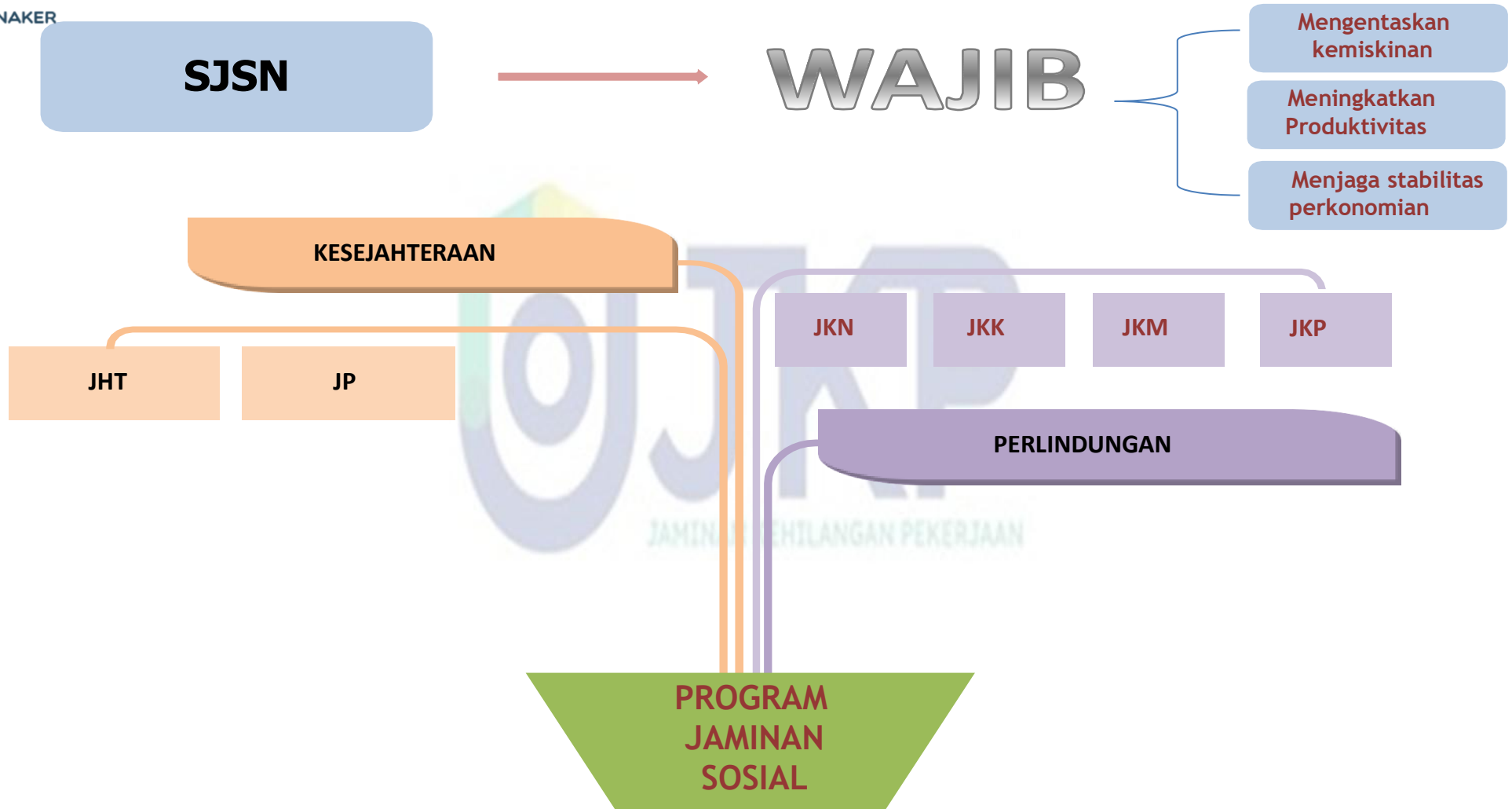
1. Setiap pekerja/ buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja
2. Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta ke BPJS



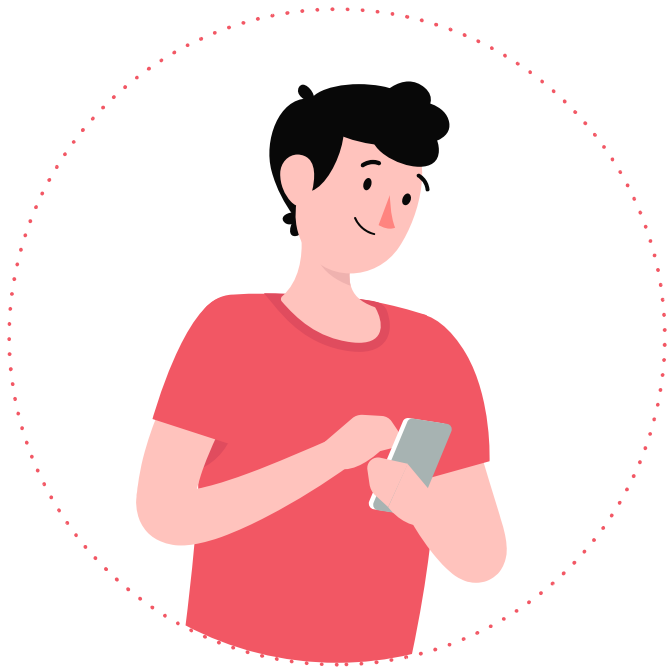


KEMNAKER

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL



JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

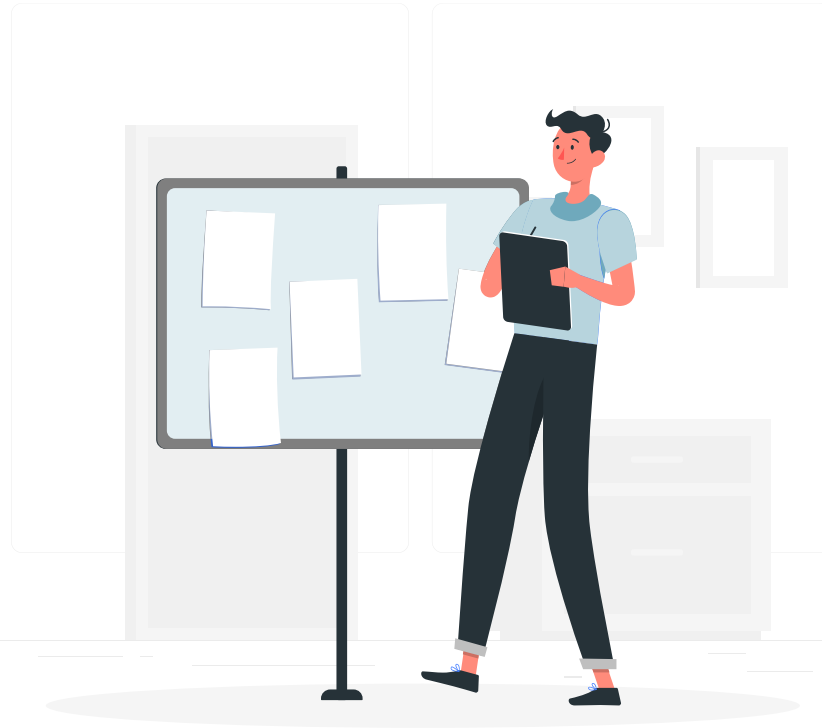


Jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami PHK berupa *manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.*

[Pasal 1 angka 1 PP 37 thn 21]

TUJUAN JKP

Mempertahankan **derajat kehidupan yang layak** pada saat pekerja kehilangan pekerjaan/terkena PHK sehingga akan **memotivasi pekerja** untuk berkeinginan bekerja kembali atau berusaha mandiri.



PESERTA JKP



MANFAAT JKP

1

Uang tunai sebesar 60% untuk paling lama 6 bulan
Batas upah 5 Juta

2

Mengalami PHK baik untuk PKWTT atau PKWT (PHK oleh pengusaha dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT)

3

Pelatihan Kerja
Diselenggarakan secara daring dan/atau luring yang diselenggarakan Lembaga pelatihan kerja.

4

Akses informasi pasar kerja
(Informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan)
Bimbingan jabatan (asesmen diri atau penilaian diri dan/atau konseling karir)



TIDAK BERHAK MANFAAT JKP

- 1 Mengundurkan diri
- 2 Cacat total tetap
- 3 Pensiun
- 4 Meninggal dunia
- 5 PKWT berakhir sesuai jangka waktu kontrak kerjanya



HILANGNYA HAK ATAS JKP



1

Tidak mengajukan permohonan klaim manfaat JKP selama 6 bulan sejak PHK

2

Telah mendapatkan pekerjaan

3

Meninggal dunia

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan **berakhirnya hak dan kewajiban** antara pekerja dan pengusaha.



PERUSAHAAN PAILIT ATAU TUTUP



1

Perusahaan Pailit atau Tutup sesuai ketentuan per UU an dan menunggak iuran paling lama 6 bln ,maka manfaat JKP tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

2

Ketentuan pembayaran manfaat JKP tdk menghapuskan kewajiban pengusaha utk melunasi iuran dan denda program Jaminan social ketenagakerjaan.

BUKTI PHK

1

Bukti diterimanya PHK oleh pekerja dan **tanda terima laporan PHK** dari Kementrian, provinsi Dinas Kab/Kota

2

Perjanjian bersama disertai dgn ; Akta bukti pendaftaran PB yg dikeluarkan oleh PHI **atau** Tanda terima laporan PHK dari Kementrian Provinsi Dinas Kab/Kota **atau** Petikan atau salinan putusan PHI yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap



PERANAN PARA PIHAK DALAM JKP

PEMERINTAH

1) MEDIATOR HI

- Pembinaan HI
- Pengembangan HI
- Penyelesaian Perselisihan HI
- Memastikan keabsahan bukti PHK, memberikan tanda terima lapor PHK.
- Menghimpun data jumlah PHK yang inkraht
- Berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan
- Memberikan pelayanan JKP dengan maksimal, cepat dan professional

2) PENGANTAR KERJA/KONSELOR/PETUGAS ANTAR KERJA

- Melakukan konseling
- Berkerjasama dengan portal layanan loker
- Melakukan bimbingan karir

3) INSTRUKTUR

- Melakukan pelatihan
- Kerjasama dengan LPK

4) PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

- Penegakan hukum
- Peningkatan kepatuhan

PENGUSAHA

- Mematuhi penahapan kepesertaan.
- Melaporkan Perubahan data (WLKP).
- Melaporkan PHK.
Membayar JKP terlebih dahulu apabila menunggak iuran lebih dari 3 bulan

PEKERJA

- Mendaftar akun SIAPkerja
- Melaporkan PHK melalui SIAP Kerja.
- Mengajukan Klaim.

BPJS

- Melakukan rekomposisi
- Memverifikasi dan memvalidasi pengajuan klaim
- Membayarkan manfaat uang tunai
- Menagih tunggakan iuran
- Membayarkan manfaat uang pelatihan

Catatan

- Ditjen PHI dan Jamsos membayarkan iuran dana Pemerintah
- Ditjen Binalovotas melakukan kerjasama dengan LPK
- Ditjen Binapenta Pengembangan SDM Pengantar Kerja, Petugas antar kerja
- Setjen (Pasker) melakukan kerjasama dengan portal loker
- Barenbang Penyediaan dan Maintanance sistem informasi ketenagakerjaan

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja

Yth. Sdr/Sdri¹
di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:²

Nama :
Jabatan :

Dengan ini memberitahukan kepada Saudara/Saudari:³

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja/ Divisi :
Perjanjian Kerja : Nomor Tanggal

Bahwa⁴

Sehubungan hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 jo Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ahli Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka diminta kepada Saudara/Saudari agar memberikan tanggapan tertulis kepada kami dalam waktu paling lambat⁵
Hak kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan ini.

Atas Perhatian Saudara/Saudari diucapkan terima kasih.

.....⁶

*Tanda tangan
Dan stempel perusahaan*

Keterangan:

- 1) Diisi nama pekerja/buruh
- 2) Diisi nama dan jabatan pimpinan perusahaan
- 3) Diisi nama, jabatan, dan unit kerja/divisi pekerja. Burh serta nomor dan tanggal perjanjian kerja.
- 4) Jelaskan maksud dan alasan PHK, besaran kompensasi PHK, hak lainnya yang timbul akibat PHK, kapan akan dibayarkan dan bagaimana cara pembayarannya serta informasi lainnya sesuai kebutuhan
- 5) Diisi batas akhir jangka waktu pemberian tanggapan oleh pekerja/ buruh.
- 6) Diisi tempat dan tanggal surat pemberitahuan dikeluarkan, tanda tangan pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, serta nama pimpinan perusahaan sesuai keterangan nomor 2 di atas

CONTOH SURAT TANGGAPAN TIDAK MENOLAK PHK

Yth. Pimpinan Perusahaan¹

Di Tempat

Hal : Tanggapan atas Pemberitahuan
Pemutusan Hubungan Kerja

Yang Bertanda tangan di bawah ini:²

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja/Divisi :
Perjanjian Kerja : Nomor Tanggal

Berdasarkan surat perusahaan nomor Tanggal Hal³ yang saya terima pada tanggal⁴ maka dengan ini saya menyatakan menerima pemutusan hubungan kerja tersebut.

Terima kasih

.....⁵

Tanda tangan pekerja/
buruh

.....

Keterangan:

- 1) Diisi nama perusahaan
- 2) Diisi nama, jabatan, dan unit kerja/ divisi pekerja. Buruh serta nomor dan tanggal perjanjian kerja
- 3) Diisi nomor, tanggal dan hal surat pemberitahuan PHK yang disampaikan perusahaan kepada pekerja/buruh
- 4) Diisi tanggal penerimaan surat pemberitahuan PHK dari perusahaan oleh pekerja/buruh
- 5) Diisi tempat dan tanggal surat tanggapan dikeluarkan, tanda tangan dan nama pekerja/ buruh

CONTOH SURAT LAPORAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Laporan Pemutusan Hubungan Kerja

Yth. Kepala Dinas¹
di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:²

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :

Berdasarkan surat perusahaan nomor Tanggal Hal³ dan surat tanggapan pekerja/buruh tanggal⁴ yang ditandatangani oleh saudara/saudari:⁵

Nama :
jabatan :
Unit kerja/ Divisi :
Perjanjian Kerja : Nomor Tanggal

Dengan ini kami laporkan bahwa

1. Hubungan kerja antara perusahaan⁶ dengan saudara/saudari⁷ telah berakhir karena pemutusan hubungan kerja dengan alasan⁸
2. Perusahaan telah memberitahukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/ buruh dan pekerja/ buruh tidak menolak pemutusan hubungan kerja.
3. Kompensasi pemutusan hubungan kerja dan hak-hak lainnya akan/ sudah⁹ dibayar pada tanggal¹⁰

Atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

.....¹¹

*Tanda tangan dan
Stempel Perusahaan*

.....

Keterangan:

- 1) Diisi tujuan surat kepada Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/ Kota
- 2) Diisi nama, dan jabatan pimpinan perusahaan, serta nama dan alamat perusahaan
- 3) Diisi nomor, tanggal dan hal surat pemberitahuan PHK yang disampaikan perusahaan kepada pekerja/buruh
- 4) Diisi tanggal surat tanggapan pekerja/ buruh yang disampaikan kepada perusahaan.
- 5) Diisi nama, jabatan, dan unit kerja/ divisi pekerja/ buruh serta nomor dan tanggal perjanjian kerja
- 6) Diisi nama perusahaan
- 7) Diisi nama pekerja/ buruh
- 8) Diisi alasan PHK
- 9) Pilih atas coret salah satu
- 10) Diisi tanggal pembayaran kompensasi PHK
- 11) Diisi tempat dan tanggal surat laporan PHK, tanda tangan pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, serta nama pimpinan perusahaan sesuai keterangan nomor 2 di atas

TANDA TERIMA LAPORAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

KOP DINAS

TANDA TERIMA LAPORAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Nomor¹

Yang bertanda tangan di bawah ini: ²

Nama :
Jabatan :
NIP :

Telah menerima laporan pemutusan hubungan kerja dengan alasan³ dari perusahaan⁴ berdasarkan surat perusahaan nomor Tanggal Hal⁵ yang dilengkapi dengan lampiran.

1. Surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan; dan
2. Surat tanggapan tidak menolak pemutusan hubungan kerja dari pekerja/ buruh.

.....⁶
Kepala Dinas

*Tanda Tangan
Dan Stempel*

.....
NIP

Keterangan:

- 1) Diisi nomor tanda terima laporan PHK sesuai ketentuan administrasi di Dinas
- 2) Diisi nama, jabatan, dan NIP Kepala Dinas yang menerima laporan PHK
- 3) Diisi alasan pemutusan hubungan kerja
- 4) Diisi nama perusahaan
- 5) Diisi nomor, tanggal dan hal surat laporan PHK yang disampaikan perusahaan kepada Dinas.
- 6) Diisi tempat dan tanggal tanda terima laporan PHK dikeluarkan, kepala Dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang mengeluarkan tanda terima laporan PHK berikut tanda tangan stempel Dinas, serta nama dan NIP Kepala Dinas

CONTOH FORMAT PERJANJIAN BERSAMA

PERJANJIAN BERSAMA

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :

Yang selanjutnya disebut Pihak Ke-1 (Pengusaha)

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Yang selanjutnya disebut Pihak Ke-II (Pekerja/ Buruh/ SP/SB)

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No.2 tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) antara Pihak ke-I dan Pihak ke-II telah mengadakan perundingan secara Bipartit dan telah tercapai kesepakatan sebagai berikut:

.....
.....
.....

Kesepakatan ini merupakan perjanjian bersama yang berlaku sejak ditandatangani diatas materai cukup.

Demikian Perjanjian Bersama ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang didasari itikad baik.

Pihak Pengusaha

Pihak Pekerja/ Buruh/ SP/SB

.....

.....

CONTOH AKTA BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA

KOP

AKTA BUKTI PENDAFTARAN
PERJANJIAN BERSAMA MELALUI BIPARTIT
No:

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Telah didaftarkan perjanjian bersama melalui Bipartit antara:

Nama :
Pekerjaan/ Jabatan :
Alamat :

dengan

Nama :
Pekerjaan/ Jabatan :
Alamat :

Demikian dibuat akta bukti pendaftaran perjanjian ini atas permintaan:

Nama :
Pekerjaan/ Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004.

PEMOHON PENDAFTARAN

.....

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

*Tanda Tangan
Dan Stempel*

.....
NIP

CONTOH PETIKAN/PUTUSAN PENGADILAN

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menyatakan hubungan kerja Tergugat beralih menjadi hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat PT Dengan Tergugat Terhitung sejak putusan dibacakan:
4. Menghukum Penggugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, Tergugat Bernard Fredik Redjauw yang seluruhnya sejumlah Rp. 38.950.567,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Uang Pesangon $0,5 \times 7 \times 7.301.984 = \text{Rp. } 14.603.968,00$
 2. Uang Masa Kerja $2 \times 7.301.984,00 = \text{Rp. } 14.603.968,00$
 3. Uang Penggantian Hak
 - a. Uang Pisah sebesar $= \text{Rp. } 7.301.968,00$
 - b. THR 2(dua) kali gaji $= \text{Rp. } 2.4440.663,00$
 - Jumlah $= \text{Rp. } 38.950.567,00$
 - c. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jayapura, pada hari senin, tanggal Bulan Tahun ..., oleh kami Sebagai Hakim Ketua Dan Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Nomor Tanggal Bulan Tahun, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, serta dihadiri Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

-Ttd-

.....

-Ttd-

.....

Hakim Ketua,

-Ttd-

.....

Terima
Kasih